



## Determinan Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kota Banjarmasin dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi

Angelita Serlina Langwo<sup>1</sup>, Saifhul Anuar Syahdan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi keuangan pemerintah daerah, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Banjarmasin. Sampel penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, data diperoleh dari responden yang bekerja di bagian keuangan. Selain itu, metode *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode regresi berganda. Selanjutnya pada penelitian ini membuktikan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan dan kapasitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** standar akuntansi pemerintahan, SIKD, kapasitas SDM, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.

### Abstract

*The aim of this study was to determine the effect of understanding the government accounting standards, utilization of regional government financial information systems, and human resource capacity on the quality of financial statements of local government in Banjarmasin. The sample of this study was Local Work Units (SKPD). In addition, the data were obtained from the respondents who worked in the financial department. Moreover, the purposive sampling method was used in this study. The data was then analyzed using the multiple regression method. Furthermore, the results of this study showed that the utilization of regional government financial information systems had a significant effect on the quality of local government financial statements. While understanding of government accounting standards and human resource capacity had no significant influence on the quality of local government financial statements.*

**Keywords:** *government accounting standards, regional government financial accounting information systems, human resource capacity, internal control systems and quality of financial statements*

### PENDAHULUAN

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP, 2010) akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya, SAP yang merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam



menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah serta memprediksi ekonomi setelah kegiatan pemerintahan telah dilaksanakan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang merupakan perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2005.

Pada wawancara pendahuluan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Tengah menyatakan sebelum adanya aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), 33 SKPD kota Banjarmasin menggunakan aplikasi lama yang bernama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKD) yang mana aplikasi ini guna menjawab kebutuhan informasi perencanaan dan keuangan. Menurut Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti (2021), aplikasi perencanaan dan keuangan ini berbeda-beda disetiap daerah sehingga sulit untuk diintegrasikan serta aplikasi perencanaan dan keuangan yang ada disetiap daerah tersebut hanya dapat diakses oleh pemerintahan daerah saja, sedangkan sekarang pemerintah pusat menginginkan adanya transparansi atau keterbukaannya informasi di daerah.

Ketika informasi dalam laporan keuangan telah sesuai dengan karakteristik kualitatif yang disyaratkan maka kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan akan mudah dipahami dan bebas dari kesalahan yang menyimpang. Namun sebaliknya apabila informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan nilai kriteria informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maka akan menimbulkan banyak permasalahan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem mulai dari tahap pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penyusunan laporan.

Yuliani, dkk (2010) dalam penelitiannya menyatakan pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Fikri (2011) menunjukkan bahwa SIKD dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Begitupun penelitian Afiah dan Rahmatika (2014) bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pada kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Yensi dan Anisma (2014) bahwa sistem pengendalian internal tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Adanya perbedaan hasil penelitian di atas memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rohmah dan Sari (2020), yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel kapasitas sumber daya manusia, dengan alasan sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan, karena pada suatu instansi memiliki nilai tinggi yang disebabkan oleh kemampuan,



pengetahuan, dan keterampilan. Dengan kata lain, unsur kualitas Sumber Daya Manusia berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah (Azwar, 2015). Perbedaan lainnya Rohmah dan Sari (2020) menggunakan sampel dari BPKAD bidang akuntansi dan penatausahaan aset daerah, sementara penelitian ini menggunakan sampel dari 14 instansi yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarmasin.

Objek penelitian ini adalah SKPD di Kota Banjarmasin, dengan pertimbangan bahwa Banjarmasin merupakan Ibu Kota Kalimantan Selatan, yang paling menonjol di Pulau Kalimantan, khususnya Banjarmasin yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan serta memiliki APBD cukup besar dibandingkan Kota atau Kabupaten lainnya (LAKIP, 2019). Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan penelitian ini apakah standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Teori *Stewardship* menjelaskan situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan individu melainkan manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan adanya hubungan yang sangat kuat antara keputusan dan kepuasan organisasi.

Menurut Putro (2013) teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Putro juga menjelaskan apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015), laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyampaikan kegiatan bisnis dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan sebuah perusahaan sering diaudit lembaga tertentu untuk memastikan keakuratan laporan, terutama urusan pajak, pembiayaan atau investasi. Dengan begitu pentingnya laporan keuangan, maka dibuat aturan laporan keuangan secara umum dengan dikeluarkannya aturan PSAK 1. Aturan PSAK 1 juga dibuat agar setiap penyajian laporan keuangan dapat selalu dibandingkan dari satu periode ke periode lain ataupun dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Laporan keuangan menyajikan informasi seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik dan arus kas.

### **Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah**

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah merupakan suatu kemampuan seseorang bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan mengukur, mengklarifikasi, dan mengikhtisarkan penyajian laporan keuangan sesuai dengan pedoman pada prinsip dan standar penyusunan yang diterapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



## Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Pemahaman standar akuntansi pemerintahan adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Wulandari dan Muhammad, 2014). Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh BPKAD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

## Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dilihat dari kemampuan SDM dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Pemerintah Daerah juga mengadakan pendidikan serta pelatihan bagi pengelola keuangan untuk meningkatkan kompetensi SDM. yang berkompeten dan diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai Standarnya. (Sukmaningrum dan Puji, 2012).

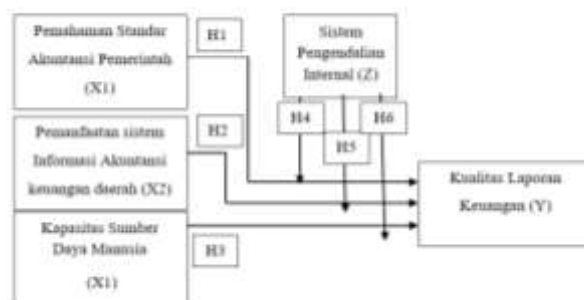
## Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai mengenai tujuan suatu pemerintah daerah yang tercermin dari ketepatan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan yang tercabtum pada (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020).

## Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pemikiran mengenai pengaruh antar pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah Kota Banjarmasin, sistem pengendalian internal, dan kapasitas SDM dalam penelitian ini dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Banjarmasin yaitu variabel dependen pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Gambar Hubungan variabel



Sumber: Data orian penulis (2022)

## Perumusan Hipotesis

### Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang berkualitas maka yang melaksanakan tugas dan menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu pegawai yang terlibat pada aktivitas tersebut harus memahami dan mengerti bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi pemerintah itu dilakukan



sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penelitian Yuliani, dkk (2010), Rohmah dan Sari (2020), menyatakan bahwa pemahaman SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dibangun sebagai berikut:

H1: Pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses dan dikelola oleh berbagai pihak dan masyarakat luas (Peraturan Pemerintah RI No.65 tahun 2010). SIKD dapat membantu dalam penyajian dan peningkatan pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian Yensi dan Anisma (2014), Fikri (2011), Yuliani, dkk (2010), Rohmah dan Sari (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H<sub>2</sub>: Sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sumber daya manusia yang berkompetensi dan memiliki pengetahuan dalam pengelolaan informasi akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik, bernilai tinggi dan berkualitas. Maka sebaliknya jika sumber daya manusia yang ada tidak memiliki keterampilan untuk mempertanggung jawabkan sistem dan kualitas laporan keuangan, maka laporan tidak bernilai dalam fungsinya untuk pengambilan keputusan. Hasil penelitian (Nur, 2019) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H<sub>3</sub>: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Memoderasi Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah pada Kualitas Laporan Keuangan**

Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, diharapkan dapat menunjang efektivitas dan efisiensi dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sehingga akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem Pengendalian Internal mengupayakan adanya jaminan ditaatinya peraturan dalam proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Gamaliel, dkk (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dapat diasumsikan proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah akan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.





H4: Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Memoderasi Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah pada Kualitas Laporan Keuangan**

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang berkelanjutan didalam entitas yang dipengaruhi oleh dewan pengawas dan lainnya. Sistem pengendalian interna memberikan jaminan yang wajar, bukan yang *absolut* karena kemungkinan kesalahan manusia, dan penolakan manajemen atas pengendalian, membuat proses ini menjadi tidak sempurna. Penelitian yang dilakukan oleh Hardynsyah (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H5: Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan pemerintah daerah.

#### **Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan.**

Sistem pengendalian internal merupakan prasyarat dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau penyelenggara pemerintah mengelola keuangan dengan baik. Sistem pengendalian internal yang juga didukung dengan SDM yang kompeten sehingga diharapkan mampu menghasilkan lap keuangan yang andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

H6: Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Kota Banjarmasin. Dalam penyebaran kuesioner dilakukan dengan membagikan secara langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarmasin. Jumlah SKPD di Kota Banjarmasin berjumlah 27 (<https://banjarmasinkota.go.id/skpd>, 09 Desember 2021). Sumber data penelitian ini merupakan kepala kasubbag perencanaan serta staf dari instansi yang terdapat didalam SKPD Kota Banjarmasin.

### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel dependen yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Variabel independen terdiri dari Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah ( $X_1$ ), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_2$ ), Kapasitas Sumber Daya Manusia ( $X_3$ ) dan Sistem Pengendalian Internal ( $Z$ ) sebagai variabel moderasi. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini yaitu skala likert dengan skor 1 sampai 5. Skala 1 STS (sangat tidak setuju), skala 2 TS (tidak setuju), skala 3 N (netral), skala 4 S



(setuju), skala 5 ST (sangat setuju).

### Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini masing-masing, yaitu Statistik Deskriptif, Uji instrumen (validitas dan reliabilitas), Uji Asumsi Klasik, dan Analisis regresi berganda.

Rumus linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + E$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

X<sub>2</sub> = Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

X<sub>3</sub> = Kapasitas Sumber Daya Manusia

E = Tingkat kesalahan (*error*)

### Moderated Regression Analysis (MRA)

Persamaan yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.Z + \beta_5.X_1.Z + \beta_6.X_2.Z + \beta_7.X_3.Z + E$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$  = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

X<sub>2</sub> = Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKD)

X<sub>3</sub> = Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Z = Sistem Pengendalian Internal (SPI)

E = Tingkat Kesalahan (*Error*)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Tabel 1  
Hasil Analisis Statistik  
Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAP	57	47,00	65,00	57,1053	4,65481
SIKD	57	16,00	82,00	42,0000	8,57738
SDM	57	14,00	30,00	25,4035	4,39098
SPI	57	21,00	35,00	31,8070	3,45604
LK	57	32,00	40,00	36,5263	3,30641

Sumber: Data diolah kembali, 2022



## Uji Asumsi klasik

### Uji Normalitas

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		57
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2,97661439
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.095
	<i>Positive</i>	.087
	<i>Negative</i>	-.095
<i>Test Statistic</i>		.095
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data Sekunder Diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai  $0,200 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas – *Tolerance* dan VIF

<b>Variabel Independen</b>	<i>Collinearity Statistic</i>	
	<i>Tolerance</i>	<b>VIF</b>
SAP	0,978	1,022
SIKD	0,939	1,065
SDM	0,940	1,094

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada Tabel 3, semua variabel baik nilai tolerance  $\geq 0,1$  dan VIF  $\leq 10$ , dapat disimpulkan variabel bebas tidak terjadi multikolonieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>Sig</i>	Kesimpulan
SAP	0,63	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
SIKD	0,304	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
SDM	0,699	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah 2022





Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa signifikan pada variabel (*sig*) lebih besar dari 0,05 sehingga, dapat dikatakan bahwa pada uji ini tidak terjadi adanya masalah heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

No	Variabel	du	Durbin Watson	4-du	Keterangan
1		1,4637	1.807	2,5363	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,807 yaitu lebih besar dari nilai du sebesar 1,4637 dan lebih kecil dari nilai 4-du sebesar 2,5363. Dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

### Uji Hipotesis

Uji Statistik F (Uji kelayakan model)

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	116,037	3	38,679	4,132	0,001 <sup>b</sup>
	Residual	496,173	53	9,362		
	Total	612,211	56			

Sumber: Data sekunder yang di olah 2022

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil bahwa nilai F sebesar 4,132 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Maka hasil tersebut  $0,001 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian secara simultan SAP, SIKD, SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Hasil (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.435	0.190	0.144	3,05970

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil nilai R<sup>2</sup> 0,190. Hal ini berarti 19% variabel Kualitas Laporan Keuangan dipengaruhi oleh variabel SAP, SIKD, SDM. Sedangkan sisanya sebesar 81% ditentukan oleh faktor lain diluar model regresi yang diuji.



### Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	25,143	6,174		4,073	0,000
SAP	0,044	0,089	0,062	0,496	0,622
SIKD	0,150	0,049	0,389	3,048	0,004
SDM	0,101	0,096	0,134	1,053	0,297

Sumber: Data sekunder yang diolah 2022

Berdasarkan hasil uji statistik t yang terdapat pada tabel 4.20 dapat dijelaskan bahwa:

7. Variabel independen Standar Akuntansi Pemerintah yang memiliki nilai t sebesar 0,181 dengan nilai signifikan  $0,856 > 0,05$  yang berarti bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka dapat disimpulkan H1 ditolak.
8. Variabel independen SIKD memiliki nilai t sebesar 3,114 dengan nilai signifikan  $0,003 < 0,05$  yang berarti bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka dapat disimpulkan H2 diterima.
9. Variabel independen Kapasitas Sumber Daya Manusia yang memiliki nilai t sebesar 0,566 dengan nilai signifikan  $0,574 > 0,05$  yang berarti bahwa Kapasitas Sumberdaya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka dapat disimpulkan H3 ditolak.

### Hasil Analisis Regresi Moderasi Variabel SAP

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29,293	3,030		9,668	,000
	SAP*SPI	,004	,002	,309	2,411	,019

Sumber: Data sekunder 2022.

SAP memiliki nilai t sebesar 2,411 dengan nilai signifikan  $0,019 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa SAP mampu memperkuat SPI terhadap kualitas laporan keuangan, maka **H4 diterima**.

### Hasil Analisis Regresi Moderasi Variabel SIKD

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28,695	1,651		17,382	,000
	SIKD*SPI	,006	,001	,549	4,868	,000

Sumber: Data sekunder 2022.



SIKD memiliki nilai  $t$  sebesar 4,868 dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa SIKD mampu memperkuat SPI terhadap kualitas laporan keuangan, maka **H5 diterima**.

#### Hasil Analisis Regresi Moderasi Variabel SDM

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	<i>t</i>	Sig.
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	31,090	1,927		16,137	,000
	SDM*SPI	,007	,002	,363	2,889	,006

Sumber: Data sekunder 2022.

SPI memiliki nilai  $t$  sebesar 2,889 dengan nilai signifikan  $0,006 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM mampu memperkuat SPI terhadap kualitas laporan keuangan, maka **H6 diterima**.

#### Pembahasan

##### Pengaruh Pemahaman SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menyatakan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal tersebut dimaknai bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman SAP tidak dibarengi dengan kualitas laporan keuangan, begitu pula sebaliknya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP menyatakan keandalan informasi akuntansi dan laporan keuangan. 3 hal yang menimbulkan keandalan dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu: (a) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif, (b) Pertimbangan manfaat dan biaya, dan (c) Materialitas. Hal ini mungkin disebabkan karena perbedaan wilayah yang dijadikan sampel dengan penelitian sebelumnya dan kemungkinan disebabkan responden yang ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan tersebut tidak memiliki kompetensi yang memadai dibidang akuntansi atau belum bisa memahami akuntansi pemerintahan dengan baik sehingga dapat menimbulkan pemahaman terhadap ketentuan yang digunakan sebagai acuan atau pedoman berbeda-beda. teori *stewardship* dimana d teori ini menjelaskan bagaimana manager merekrut seorang karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi tersebut.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Inapty dan Martiningsih (2016) yang menyatakan bahwa penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Riani (2014) yang menyatakan bahwa SAP tidak berpengaruh berdasarkan hasil yang didapat masih belum ada yang memenuhi SAP berdasarkan PP no 71 tahun 2010, hal ini terjadi karena walaupun SAP Full Akrual mulai disahkan tahun 2010, namun belum berlaku efektif pada tahun 2010.

##### Pengaruh Pemanfaatan SIKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hal ini berarti bahwa



pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah mampu membantu memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. teori *stewardship* dimana seorang karyawan yang mengupayakan bagaimana agar bisa memanfaatkan sistem informasi yang baru demi mendapatkan kualitas laporan yang baik.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2011) dan Afiah dan Rahmatika (2014), yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi nilai informasi yang dihasilkan (Pujiswara dkk, 2014).

#### **Pengaruh Kapasitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil penelitian menyatakan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dapat dikatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan tidak menguasai laporan keuangan sehingga sumber daya manusia tidak kompeten di bidang akuntansi. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Atikah (2014), yang mengatakan bahwa hasil pengujian yang didapat adalah tidak ada pengaruh signifikan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **Pengaruh Pemahaman SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang dimoderasi Sistem Pengendalian Internal (SPI)**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal diproksikan SPI dapat memoderasi Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian bahwa Sistem Pengendalian Internal dapat memoderasi Pemahaman SAP terbukti. Sistem Pengendalian Internal (SPI) mengupayakan adanya jaminan ditaatinya peraturan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan yang berlaku. Hal tersebut berimplikasi pada kualitas dari laporan keuangan yang disusun, ketika pemerintah daerah dalam proses penyusunan laporannya menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik sehingga laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka akan dapat menghasilkan output/produk yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farikho (2019) yang menyatakan sistem pengendalian internal mampu memoderasi Pemanfaatan Standar Akuntansi Pemerintah.

#### **Pengaruh Pemanfaatan SIKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang Dimoderasi Sistem Pengendalian Internal (SPI)**

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal diproksikan SPI dapat memoderasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yang terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa Sistem Pengendalian Internal dapat memoderasi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terbukti.

Hal ini mengidentifikasi bahwa pemerintah Kota Banjarmasin telah mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini mendukung teori *stewardship*. Teori tersebut didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik



pada prinsipnya Hasil ini sejalan dengan penelitian Achmad (2018) yang menyatakan hasil bahwa sistem pengendalian internal mampu memoderasi pemanfaatan SIKD

### **Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang Dimoderasi Sistem Pengendalian Internal.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal diproksikan SPI dapat memoderasi Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal dapat memoderasi Kapasitas Sumber Daya Manusia terbukti.

Sumber daya manusia akan melakukan pekerjaan yang baik jika ditempatkan pada bidangnya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan latar belakang pendidikannya, pelatihan ini harus dilakukan oleh pemerinbtah setempat demi meningkatkan kompetensinya. Sistem pengendalian internal sangat memadai dan dapat berperan dalam memaksimalkan kompetensi SDM. Penelitian ini mendukung teori *stewardship*. Teori ini dapat menjelaskan bahwa pemerintah sebagai *steward* akan meningkatkan kompetensi pegawai sebagai upaya yang terbaik pada masyarakat sebagai *principal*. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai dibutuhkan sistem pengendalian internal yang memadai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farikho (2019) yang menyatakan sistem pengendalian internal mampu memoderasi kapasitas sumber daya manusia.

### **SIMPULAN**

1. Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Banjarmasin karena penyusun laporan keuangan tersebut tidak memiliki kompetensi yang memadai dibidang akuntansi atau belum bisa memahami akuntansi pemerintah dengan baik sehingga dapat menimbulkan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku.
2. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi nilai informasi yang dihasilkan.
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan tidak menguasai laporan keuangan sehingga sumber daya manusia tidak kompeten di bidang akuntansi.
4. Standar Akuntansi Pemerintah yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah daerah dalam proses penyusunan laporannya mampu menerapkan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik sehingga laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka akan dapat menghasilkan output atau produk yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas.





5. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banjarmasin telah mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi.
6. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sistem pengendalian internal yang sangat memadai dan dapat berperan dalam memaksimalkan kompetensi sumber daya manusia.

### **Implikasi**

1. Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada pada pemerintah daerah, sebaiknya dinas lebih memperhatikan kinerja SDM atau pegawainya untuk bisa memahami Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, sehingga mampu membuat laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dalam pembagian kuesioner harus sesuai dengan kebutuhan dari penelitian itu sendiri serta disarankan untuk mempertimbangkan waktu penelitian yang tepat, terutama yang menggunakan data primer, karena untuk meneliti pada SKPD menunggu surat di proses cenderung lama.

### **Keterbatasan**

1. Pada penelitian ini belum mencakup keseluruhan SKPD di Kota Banjarmasin.
2. Responden pada penelitian ini sangat terbatas yaitu pada pegawai bagian keuangan yang ada pada SKPD Kota Banjarmasin. Data yang diperoleh dari penelitian ini hanya berdasarkan persepsi pegawai bagian keuangan SKPD Kota Banjarmasin.
3. Subjek penelitian ini masih bisa di perluas dengan menyertakan pihak lain selain penyedia laporan keuangan seperti pengguna laporan keuangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afiah, N, N., Rahmatika, N, D. 2014. *Factor Influencing The Quality Of Financial Reporting and its Implication On Government Governance. International Journal of Business, Economics and Law*. Vol 5 No.1. Desember. Hal 114-121.
- Azwar, Saifuddin. 2017. *Teori dan Pengukuran Sikap Manusia*. Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Barlian, Eri. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Vol 1. Hal.1-178.
- Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO). 2015. *Sistem Pengendalian Menurut CASO* (<https://accounting.binus.ac.id/2015/09/25/sistem-pengendalian-menurut-coso/>)
- Davis. Donalson. 1989. *Informasi Teknologi Introduction. MIS Quartely*. Vol 13 No. 3. September.
- Fikri, Miftahul. (2011). *Pengarus Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Instansi Pemerintah Kota Padang*. Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Hardyansyah. 2016. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar*. Jurnal Ilmiah Akuntansi. 15-18.
- Hutasuhut, Irpan. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.
- Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2009 tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. (<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak>).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indrisari, Desi dan Ertambang Nahartyo. (2007). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Palembang: Universitas Gajah Mada. ([http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/36807](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/36807), diakses 5 Desember 2021).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2021. (<https://kbbi.web.id/paham>, diakses 2 Desember 2021).
- Kasmir. 2013. *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: Rajawali (<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1137406>, diakses 1 Desember 2021).
- Kiki. 2021. *Terkait tudingan Alipp soal SIPD kacau, ini alasan Pemprov banten* (<https://pojoksatu.id/banten/2021/02/23/terkait-tudingan-alipp-soal-sipd-kacau-ini-alasan-pemprov-banten/>, 5 Desember 2021).
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi* (ketiga). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2019. (<https://www.finansialmu.com/4-karakteristik-laporan-keuangan-baik-menurut-iai/>, diakses 13 Desember 2021).



- Laudon, Kenneth., Laudon, Jane. 2000. *Management Information System Managing the Digital Firm*. 10th Pearson Education, Inc: Pearson.
- LinovHR. 2019. 7 Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Para Ahli. (<https://www.financialmu.com/4-karakteristik-laporan-keuangan-baik-menurut-iai/>), diakses 1 Desember 2021).
- Mulyadi. 2009. *Sistem Pengendalian Intern (auditing)*. (<https://eleks-mulyadi.blogspot.com/2009/12/pengendalian-intern-auditing.html>), diakses 12 November 2021).
- Nur, Rizky Aulina. (2019). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Berdagai*. Skripsi. Medan: Falkutas Ekonomi Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah. (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>), diakses 12 November 2021).
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pilander, S. M., Paul, D. E. S., & Gamaliel, H. (2018). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu*.
- Prawiro, Muhammad. 2019. Laporan Keuangan: Pengertian, Tujuan, dan Jenis Laporan Keuangan. (<https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/laporan-keuangan.html>).
- Putro, Dian Permana. (2019). *Pengaruh Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara dan evektifitas Implementasi Aplikasi SIMAK-BMN yang Terintregasi Kedalam Sakti Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Skripsi. Jakarta: Universitas Bakrie.
- Rohmah, Lailatur. Askandar, Noor Shodiq. Sari, Arista Fauzi Kartika. 2020. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang*. E-JRA. Vol. 9. No. 5. Hal 43-49.
- Sari, Shinta Permata dan Banu, Winoto. 2014. *Keterandalah dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 418-425.
- Sudiaranti, Ni Made., Herawati, Nyoman Trisna., Sinarwati, Nikadek. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penetapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Medan: Universitas Sumatera Utara.



- Tujuh Pengertian sumber daya manusia menurut para ahli. (<https://www.linovhr.com/sumber-daya-manusia-menurut-para-ahli/>, diakses 1 Desember 2021).
- Wulandari dan Muhammad. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik*. Edisi 2. Solo: Selemba Original Terlaris.
- Yuliani, Safrida. Nadirsyah. Bakar, Usman. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol.3 No.2. Juli. Hal 206-220.
- Yensi, S. D., Hasan, A., Ani. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jom Fekon*. Vol 1. Hal 1-15.